



Radar Bali

Kasus Iklan Bandara Mandek di BPKP

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi di Bandara terkait dengan periklanan, sudah menetapkan tiga tersangka. Namun kasusnya sampai saat ini terkesan masih belum bergerak. Usut punya usut, kasus tersebut masih mandek di BPKP yang diminta melakukan audit atas kasus ini.

Aspidsus Kejati Bali Putu Gede Sudharma mengatakan, kasus iklan atau reklame di Bandara itu, masih didalami. Dia mengaku kasus itu masih tetap jalan, namun saat ini proses masih di BPKP. "Masih di BPKP, untuk proses audit atas kasus Bandara ini," ungkap Sudharma.

Dia mengatakan, ada beberapa hal yang masih dilakukan pihak BPKP. Yang membuat audit belum bisa dituntaskan.

Ini lantaran masih ada proses penyesuaian mekanisme, antara auditor internal di Bandara. "Ini yang membuat agak lama, masih ada kendala dan proses - proses yang harus disesuaikan dengan pihak auditor internal," jelasnya. "Tapi masih tetap optimistis kasus ini akan tuntas," pungkasnya. **(art/han)**



Radar Bali

Satpol PP Badung Tak Berdaya Tindak LED TV

PENERTIBAN reklame yang dianggap tidak sesuai Perbup penataan reklame oleh Satpol PP Badung terkesan tebang pilih. Peralnya, Satpol PP begitu galak saat memberangus reklame berupa papan billboard. Namun, Satpol PP seperti tidak berdaya saat hendak menertibakn reklame berupa papan reklame digital seperti LED TV. Di sejumlah tempat LED TV yang dinyatakan tidak sesuai Perbup masih tetap berdiri. Salah satu contohnya ada di perempatan Jalan Raya Kapal-Darmasaba.

Meski sudah tidak lagi beroperasi, namun hingga saat ini, LED TV berukuran sangat besar itu masih dibiarkan berdiri. Sepintas seperti benda mangkrak yang cukup mengganggu perwajahan. Kepala Satpol PP Kabupaten Badung, Ketut Martha saat ditemui mengatakan, pihaknya memang sengaja belum membongkar LED TV di perempatan Jalan Raya Kapal-Darmasaba karena kesulitan tenaga teknis. "Tidak sembarangan membongkarnya, harus ada teknisi khusus," dalih Martha ditemui baru-baru ini.

Katanya, investor yang sudah mengeluarkan biaya banyak untuk mendirikan LED TV juga harus dipikirkan. Pihaknya sudah menyurati investor agar membongkar LED TV tersebut karena tidak sesuai peruntukan. "Ya intinya harus hati-hati dalam membongkar. Apalagi itu kan barang mahal. Tapi, kami intinya LED TV itu tidak sesuai Perbup. Ya, mau bagaimana lagi," tukasnya. Lantas kapan dibongkar? Ditanya begitu Martha tidak bisa memberi kepastian. Pejabat asal Karangasem itu mengaku masih berkoordinasi dengan investor pemilik LED TV. "Ya nanti dulu kami koordinasi lebih lanjut dulu dengan tim yang lain," pungkas Martha. (san/han)



Edisi : Sabtu, 23 Mei 2015
Hal : 24



Radar Bali

Tuntaskan Proyek Molor, Perlu Rp 8 Miliar

AMLAPURA- Gara-gara rekanan tidak mampu menuntaskan proyek, hingga akhir 2014, Dinas Pekerjaan Umum Karangasem, harus memasang anggaran lagi pada APBD Perubahan 2015. Rencananya, jumlah anggarannya mencapai Rp 8 miliar, lebih. "Rencana itu sudah dibahas di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa, ditemui Jumat (22/5).

Hanya saja, diakui Sutirtayasa, anggaran itu belum cukup melanjutkan semua proyek tidak tuntas tahun 2014. Hal itu karena terbatasnya anggaran, sehingga hanya empat proyek jalan yang mendapat prioritas dilanjutkan menggunakan APBD Perubahan. Diantaranya proyek jalan Dlundungan-Darmaji di Desa Ban, Kecamatan Kubu. Ada juga proyek jalan di Munti Gunung di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu. Jalan lingkaran Pasar Agung, Desa Sebudi, Kecamatan Selat. Serta jalan Juuk Teki, di Desa Datah, Kecamatan Abang. Empat proyek ini, dinilai langsung menyentuh masyarakat, sebagai akses masyarakat setempat, sehingga menjadi prioritas. "Kalau itu tidak segera dilanjutkan, bisa juga meru-

gikan pemerintah lebih besar lagi. Karena, bahan yang sudah dipasang tahun lalu bisa saja lepas," tandas Sutirtayasa.

Sedangkan proyek lainnya yang termasuk proyek besar, seperti pembangunan Kantor Camat Abang, dan Sidemen, akan dilanjutkan tahun 2016, mendatang. "Yang digarap sekarang skala prioritas. Harus memikirkan anggaran yang ada juga," tambahnya. Hanya saja, proyek yang tidak tuntas tahun 2014 itu, masih berpeluang digarap rekanan yang sama. Niat Pemkab Karangasem untuk *black list* rekanan, tidak berjalan mulus, karena hasil LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), terhadap rekanan yang ingin di-*black list* belum turun. "Selama belum ada hasil LKPP, rekanan yang dulu mengerjakan itu, masih bisa ikut tender, kami tidak bisa melarang," sesal Sutirtayasa. Pihaknya akan bisa melarang rekanan ikut tender ketika sudah ada keputusan LKPP. Biasanya, batas waktu *black list*, selama dua tahun. "Saya tidak hafal nama rekanannya, tapi di catatan ada," pungkas Sutirtayasa, ditemui di Kantor Bupati Karangasem. (wan/gup)

Edisi : Sabtu, 23 Mei 2015

Hal : 27